

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Meunasah Teungku Digadong. Meskipun dirancang untuk modernisasi dan efisiensi, penerapannya di lapangan justru menciptakan sebuah paradoks berupa inefisiensi yang sistematis dan beban kerja tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan dalam penyusunan APBG menggunakan aplikasi Siskeudes. Fokus penelitian ini diarahkan pada proses implementasi kebijakan penyusunan APBG menggunakan aplikasi Siskeudes yaitu Regulasi penyusunan APBG, Rasionalisasi Anggaran APBG, Keterbatasan menu dalam aplikasi dan dokumen pelaporan serta pertanggungjawaban penyusunan APBG melalui aplikasi Siskeudes. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, serta menelaah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan program layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi tidak berjalan sebagai alur kerja digital yang utuh. Proses ini diawali dengan regulasi yang berakibat keterlambatan informasi pagu anggaran, dilanjutkan dengan rasionalisasi anggaran yang memaksa adanya sistem pengarsipan manual serta keterbatasan menu aplikasi, dan yang terakhir dengan dokumen pelaporan fisik yang meniadakan esensi digitalisasi. Selanjutnya, terjadi hambatan yang bersifat sistemik dan saling memperkuat, berakar pada tiga kegagalan utama: pertama, kegagalan komunikasi dalam bentuk pelatihan yang tidak relevan, kedua, keterbatasan sumber daya infrastruktur dan teknologi yang parah, ketiga, kekakuan struktur birokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan yang efektif mensyaratkan reformasi prosedural yang sinkron dan desain ulang mekanisme pendukung, bukan sekadar perbaikan teknis pada aplikasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Tata Kelola Desa

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Village Financial System (Siskeudes) application policy in Gampong Meunasah Teungku Digadong. Although designed for modernization and efficiency, its implementation in the field actually creates a paradox in the form of systematic inefficiency and additional workload. This study aims to analyze the policy implementation process in the preparation of the Regional Budget (APBG) using the Siskeudes application. The focus of this research is directed at the process of implementing the APBG preparation policy using the Siskeudes application, namely the Regulation of APBG preparation, APBG Budget Rationalization, the limitations of the menu in the application and reporting documents and accountability for APBG preparation through the Siskeudes application. The research approach used is qualitative with descriptive-analytical methods. Data collection was carried out through interviews, field observations, and reviewing documents related to the implementation of service programs. The results of the study indicate that the implementation process does not run as a complete digital workflow. This process begins with regulations that result in delays in budget ceiling information, followed by budget rationalization that forces a manual filing system and limits application menus, and finally, with physical reporting documents that negate the essence of digitalization. Furthermore, systemic and mutually reinforcing obstacles arise, rooted in three main failures: first, communication failures in the form of irrelevant training, second, severe limitations in infrastructure and technology resources, and third, rigid bureaucratic structures. This study concludes that effective improvements require synchronous procedural reforms and redesign of supporting mechanisms, not simply technical improvements to applications.

Keywords: Policy Implementation, Village Financial System (Siskeudes), Village Governance